



Wabup Sampaikan LKPj Melalui *Video Conference*

Audit Laporan Keuangan Terganjil Wabah Korona

PUTUSSIBAU - Akhir Maret 2020 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Namun karena kondisi pandemi Covid-19, sampai hari ini BPK belum melakukan audit terhadap laporan keuangan tersebut, sehingga realisasi anggaran yang disampaikan dalam LKPj ini masih dalam keadaan belum diaudit," ungkap Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu Antinous L. Ain Pamero saat menyampaikan Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019 di Ruang Rapat Bupati menggunakan *video conference*, Senin (20/4).

Diungkapkan Wabup bahwa pada tahun 2019, Kapuas Hulu menargetkan pendapatan atau penerimaan setelah perubahan sebesar Rp1,867 triliun, dengan realisasi Rp1,845 triliun, dengan persentase realisasi 98,82 persen. Sedangkan belanja daerah pada APBD tahun 2019 ditargetkan mereka sebesar Rp1,885 triliun, dengan realisasi sebesar Rp1,805



HUMASKAB FOR PONTIANAK POST

PIDATO: Wabup Antonius L. Ain Pamero ketika menyampaikan Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019 di Ruang Rapat Bupati, Senin (20/4) melalui vicon.

triliun atau 95,76 persen. Untuk penerimaan pembiayaan daerah dalam tahun anggaran 2019, disebutkan dia bahwa target yang dikehendaki sebesar Rp28,863 miliar, terealisasi Rp21,113 miliar atau 91,95 persen.

"Dalam rangka penyeleng-

garan urusan pemerintah dan pembangunan daerah, dapat kami sampaikan secara garis besar capaian indikator kinerja yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dilaksanakan tahun 2019. Capaian kinerja yang akan disampaikan pada

pidato pengantar ini adalah capaian indikator makro yang telah ditetapkan dalam RPJMD," papar Wabup.

Dalam pidatonya, Wabup memaparkan bahwa LKPj Kapuas Hulu tahun 2019 itu memuat capaian kinerja keuangan daerah, yang me-

liputi pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun lalu. "Selain itu terkait capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah dalam kebijakan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kapuas Hulu tahun 2016 - 2021," terang Wabup.

Lebih lanjut Wabup menyampaikan bahwa kebijakan Pemda tersebut meliputi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 2016 - 2021. "Itu ditetapkan berdasarkan visi dan misi Bupati terpilih yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran serta disinergikan dengan program Pemerintah Pusat dan Pemrov Kalbar, yang dituangkan dalam RPJMD Kapuas Hulu tahun 2016 - 2021," ulas Wabup. Konferensi tersebut dihadiri Sekda Kapuas Hulu, jajaran Forkopimda, para Asisten Setda Kapuas Hulu, pimpinan OPD, dan pimpinan DPRD Kapuas Hulu beserta anggota yang mengikuti dari kantor masing-masing. (**dRe**)